

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU BALAPAN  
MOTOR OLEH REMAJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**Oleh  
Wijayanti  
180574201004**

**ABSTRAK**

Balapan motor merupakan kegiatan beradu kecepatan dua kendaraan bermotor atau lebih yang dilangsungkan dengan tanpa adanya izin, dan dilakukan di jalan umum. Aksi kebut-kebutan di jalan raya ini dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, tidak menggunakan standart keamanan yang memadai sebagaimana dilakukan dalam ajang balapan motor resmi, seperti menggunakan helm, sarung tangan, jaket pelindung, dan kelengkapan-kelengkapan kendaraan bermotor lainnya. Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah mengatur terkait larangan adanya kegiatan balapan motor liar ini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 115 huruf b dengan ancaman pidana yaitu pada Pasal 297 maka dari itu kegiatan berbalapan motor ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan perlu untuk dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku pembalapan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui terkait penegakan yang dilakukan Polres Kota Tanjungpinang terhadap pelaku balapan motor liar oleh remaja berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode hukum Normatif-empiris dengan menggunakan analisis data yang berbentuk kualitatif, dimana fokus penelitian ini mengkaji penegakan yang dilakukan penegak hukum dengan melakukan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penegakan terhadap balapan motor yang dilakukan oleh remaja ini kepolisian menggunakan pasal penilangan bukan dengan pasal berbalapan yaitu Pasal 115 dengan ketentuan pidana diatur pada Pasal 287 ayat(5) dan Pasal 297, tidak diterapkannya pasal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi. Adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut merupakan penyebab mengapa penegakan hukum belum ditegakkan secara maksimal.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum Pidana, Balapan motor, Remaja.

**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST YOUTH RACING WILD  
MOTORCYCLE RACING BY YOUTH BASED ON LAW NUMBER 22 OF  
2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT**

**By  
Wijayanti  
NIM.180574201004**

**ABSTRACT**

*Motor racing is an activity where two or more motorized vehicles compete with speed without a permit, and are carried out on public roads. This speeding action on the highway is carried out without the permission of the authorities, does not use adequate safety standards as is done in official motorbike racing events, such as using helmets, gloves, protective jackets, and other motorized vehicle accessories. In Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation it has regulated the prohibition of illegal motorbike racing activities as stated in Article 115 letter b with criminal penalties, namely in Article 297, therefore this motorbike racing activity is a violation of the Law -Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and it is necessary to enforce the law against racers. The purpose of this study is to find out about the enforcement by the Tanjungpinang City Police on illegal motorbike racers by teenagers based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The research method used in this study is to use the normative-empirical legal method by using qualitative data analysis, where the focus of this research examines enforcement by law enforcement by taking a statutory approach. The results of this study indicate that in terms of enforcement of motorcycle racing carried out by these teenagers the police use the fines article instead of the racing article, namely Article 115 with criminal provisions regulated in Article 287 paragraph (5) and Article 297, these articles are not implemented due to limitations - limitations in the form of time, personnel, investigative tools both related to infrastructure, quality of human resources, and lack of community participation and so on, all of which result in the necessity of discretion. The existence of these limitations is the reason why law enforcement has not been enforced optimally.*

**Keywords:** Law Enforcement, Motorbike Racing, Teenagers